



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 175/HUK/2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TAHUN 2025**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 437);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan program penyusunan Peraturan Menteri Sosial tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Program penyusunan Peraturan Menteri Sosial tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- KETIGA : Unit pemrakarsa program penyusunan Peraturan Menteri Sosial tahun 2025 melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Peraturan Menteri Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum melakukan evaluasi atas perkembangan realisasi penyusunan Peraturan Menteri Sosial untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Sosial.
- KELIMA : Pengajuan Peraturan Menteri Sosial di luar program penyusunan Peraturan Menteri Sosial tahun 2025 dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Sosial.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 175/HUK/2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL
TAHUN 2025

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TAHUN 2025

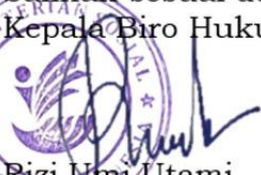
No.	Judul Rancangan Peraturan Menteri Sosial	Unit Pemrakarsa
01	02	03
1.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
2.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial	
3.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Rakyat	
4.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029	Biro Perencanaan
5.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota	
6.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Sosial	Biro Hubungan Masyarakat
7.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan	Sekretariat Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial
8.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Sarana dan Prasarana Minimal pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
9.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial	
10.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan
11.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

01	02	03
12.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi Sosial dan Pendampingan Sosial Anak Korban Kekerasan	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
13.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Hibah Langsung Dalam Negeri	Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial
14.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
15.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
16.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
17.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Risiko	Sekretariat Inspektorat Jenderal
18.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
19.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	
20.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar	
21.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial	
22.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial	
23.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat	
24.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
25.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan	

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003